

**ANALISIS DETERMINAN PELAKSANAAN E-GOVERNMENT  
DI KOTA SEMARANG (STUDI KASUS [www.semarangkota.go.id](http://www.semarangkota.go.id))**

Oleh :

Annisya Dwi Mardiyani, dan Aufarul Marom

Departemen Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro  
Jl. Profesor Haji Sudarto, Sarjana.Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405  
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**Abstract**

*E-Government makes public and private sector interact with government easily via electronic media. The problem that arises is Semarang entered the lower categories of e-government votes in 2014 by Ranking E-Government of Indonesia (PEGI) Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia. The purpose of this study is to assess the implementation of e-government in Semarang city and the factors that hinder the implementation of e-government in the Semarang city. The method used is qualitative descriptive. The results showed that the lack of regulations implementing e-government, the workload of human resources in some SKPD is too large, the difficulty of the installation of network infrastructure in the city, the financial resources of e-government Semarang financed by the budget; there are many benefits and no rejection from the public. Factors that hinder the implementation of e-government are the government support in terms of policy, human resource, and infrastructure resources. Overcoming limiting factor is the government of Semarang can formulate rules on the implementation of e-government so that Semarang has a reference in the implementation of e-government, SKPD provides a reliable employee in managing websites, installation and reparation of network done at night.*

**Keywords:** *E-government, policy, Human Resources, Infrastructure*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pemberian pelayanan publik di era otonomi daerah tidak hanya tersentral di pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah yang memiliki kekuasaan atau kebebasan dalam mengelola daerahnya sendiri. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam

reformasi pelayanan publik dalam (indiahono :2009:92) dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu : komitmen elit, pengembangan sistem pelayanan, peningkatan kualitas pelayanan dan pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi penting karena dengan penggunaan teknologi akan memaksa

komitmen elit, sistem dan aparatur pemerintah untuk berubah. Pemanfaatan teknologi informasi didalam pemerintahan yang dicanangkan untuk memenuhi harapan masyarakat dalam pemberian pelayanan yang cepat, mudah, murah saat ini adalah *e-government*. Hadirnya *e-government* di Indonesia dimulai dengan adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2001 tentang pengembangan pendayagunaan telematika di Indonesia dan di perjelas dengan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang strategi dan kebijakan nasional pengembangan *e-government*.

Kota Semarang tengah melakukan optimalisasi publikasi dan manajemen pemerintahan berbasis TIK untuk mendukung pengembangan *e-government*.

*Website* Kota Semarang merupakan bentuk *e-government* yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kota Semarang.

Pelaksanaan *e-government* di Kota Semarang belum terlepas dari masalah yang terjadi. RPJMD Kota Semarang 2010-2015 menyebutkan masalah yang dihadapi Kota Semarang tentang *e-government* adalah :

a. Masih terbatasnya kemampuan masyarakat dalam penggunaan teknologi tepat guna

b. Sebagai bagian dari akuntabilitas kepada publik, ketersediaan akses informasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan masih dirasakan belum optimal

c. Perlu ditingkatkannya kemampuan SDM aparatur dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun secara sistem

Pelaksanaan *e-government* di Kota Semarang dari hasil PeGi (*Pemeringkat E-Government* Indonesia) pada tahun 2014 mengungkapkan pelaksanaan *e-government* di Kota Semarang masih rendah, pemerintah Kota Semarang menempati posisi 13 dalam pemeringkatan *e-government* di Jawa Tengah dengan jumlah nilai 2,12 yang masih masuk ke dalam kategori kurang.

## **B. Tujuan**

Tujuan adalah hal-hal yang hendak dicapai dalam penelitian. Adapun tujuan-tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui determinan pelaksanaan *e-government* (*website*) pemerintah kota Semarang

2. Untuk mengetahui faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan *e-government* (*website*) pemerintahan Kota Semarang.

## **C. Kajian Teori**

## 1. Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen menurut Kumorotomo adalah suatu sistem yang menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. (Kumorotomo, 2009:13-14).

Sistem Informasi Manajemen Publik adalah sistem informasi manajemen yang disediakan dan digunakan oleh masyarakat, yaitu informasi yang disediakan untuk masyarakat, misalnya statistik resmi, peta, direktori, kamus, ensiklopedia, katalog barang dan jasa, peristiwa, standar, paten dan lain sebagainya

Sistem informasi berbasis komputer adalah suatu SIM yang menempatkan perangkat pengolahan data komputer dalam kedudukan yang penting. Secara garis besar SIM berbasis komputer mengandung unsur-unsur :

### 1. Manusia.

Unsur manusia dalam hal ini adalah para staff komputer profesional dan para pemakai.

### 2. Perangkat keras (*hardware*).

Perangkat keras terdiri dari komputer yang disebut dengan CPU dan semua perangkat pendukungnya.

### 3. Perangkat lunak (*software*).

Perangkat lunak merujuk pada program-program komputer beserta petunjuk-petunjuk pendukungnya..

### 4. Data.

Data adalah fakta-fakta yang akan dibuat menjadi informasi yang bermanfaat.

### 5. Prosedur.

Prosedur adalah peraturan-peraturan yang menentukan operasi sistem komputer. (Kumorotomo,2009:18-19)

## 2. *Elektronik Government*

*E-government* menurut UNDP (Indrajid, 2006 :2) adalah aplikasi teknologi informasi dan komunikasi pada lembaga pemerintah. Komparasi determinan *e-government* dari PeGi, *Harvard JFK School of Government* (Indrajid , 2004: 15-18), Al-Naimat (Al-Naimat *et al*, 2013:395-396) , Nabafu (Nabafu, 2012:43-44), dan David Gichoya (Gichoya,2005:179): terdapat 5 determinan yaitu :

### 1. Dukungan Pemerintah

Dukungan dan komitmen dari pimpinan penting dan diperlukan sepanjang pelaksanaan *e-government* untuk menyediakan dan mengalokasikan sumber daya yang cukup. Dukungan pemerintah dapat meliputi

kebijakan, kelembagaan dan perencanaan

#### 2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya manusia sangat penting karena hanya manusia yang dapat menggerakkan sumber daya lainnya. Determinan ini meliputi kemampuan penggunaan komputer dari pegawai maupun masyarakat. Pelatihan yang diberikan pihak pemerintah kepada pegawai pengelola *e-government* dalam rangka meningkatkan kualitas pengembangan *e-government*.

#### 3. Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial penting didalam pelaksanaan *e-government* karena pendanaan berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya pelaksanaan *e-government*.

#### 4. Sumber Daya Infrastruktur

Pelaksanaan *e-government* tidak akan berhasil tanpa adanya peralatan yang menunjang. Determinan ini akan dilihat insfrastruktur fisik dan jaringan

#### 5. Pengguna

Pengguna penting dalam pelaksanaan *e-government* karena dibuatnya *e-government* untuk memudahkan masyarakat. determinan pengguna meliputi manfaat yang dirasakan, kesadaran masyarakat dan resistensi terhadap perubahan.

### D. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kota Semarang sebagai pengelola *website* Kota Semarang. Pemilihan informan didasarkan pada teknik *purposive sampling* yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan pada orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan peneliti. Informan dalam penelitian ini diantaranya ialah Kepala dan pegawai Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Pesandian Kota Semarang selaku pengelola *website* Kota Semarang, Masyarakat dan Perusahaan. Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa kata-kata, dan tindakan, sumber tertulis, dan data statistik. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip atau laporan,

### PEMBAHASAN

#### A. Determinan pelaksanaan *E-government* di Kota Semarang

##### 1. Dukungan Pemerintah

###### a. Kebijakan

Kebijakan meliputi bentuk nyata dari dokumen-dokumen resmi yang memiliki kekuatan legal. Kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan *e-*

*government* di Kota Semarang adalah Instruksi Presiden Nomor 03 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggaraan Negara, Serta adanya surat edaran sekda terkait semua situs pemerintah Kota Semarang harus beralamatkan [semarangkota.go.id](http://semarangkota.go.id).

b. Kelembagaan

Pemerintah Kota Semarang telah memiliki lembaga khusus yang mengelola *e-government* termasuk [www.semarangkota.go.id](http://www.semarangkota.go.id). Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kota Semarang adalah lembaga yang bertugas untuk mengelola urusan informasi dan komunikasi di Kota Semarang. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kota Semarang dijelaskan bahwa Dinas Kominfo mempunyai tupoksi dalam mengelola teknologi, informasi dan komunikasi di Kota Semarang. Fungsi dinas salah satunya adalah untuk

merumuskan kebijakan Bidang Pengembangan Komunikasi Publik, Bidang Layanan *e-Government*, Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan Infrastruktur, dan Bidang Statistik

c. Perencanaan

Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kota Semarang, sebagai lembaga yang mengelola *e-government* bertugas untuk membuat rencana pengembangan dan pengelolaan *e-government* di Kota Semarang. Perencanaan yang mengatur tentang pemakaian atau pengelolaan *website* Kota Semarang tidak memiliki perencanaan khusus. Perencanaan tersebut berupa *masterplan* yang meliputi keseluruhan *e-government* di Kota Semarang.

2. Sumber Daya Manusia

a. Kemampuan Penggunaan Komputer

Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian memiliki Sumber Daya Manusia yang dinilai handal dalam menggunakan komputer, karena sebagian besar pegawai memiliki *background* pendidikan sarjana komputer. Pegawai dinas terkait yang ditugaskan untuk mengelola isi *website* membuat pelaksanaan *e-government* kurang optimal. Pegawai dinas memiliki

beban kerja yang terlalu besar. Hal tersebut mengakibatkan ketekunan pegawai dalam mengelola isi *website* menjadi terhambat.

b. Pelatihan

Dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya, pemerintah daerah Kota Semarang melakukan pelatihan yang berkaitan tentang *e-government* sampai ke tingkat kelurahan. Pelatihan juga dilakukan kepada SKPD sesuai dengan kompetensinya. Perwakilan SKPD tersebut dikumpulkan dalam satu ruangan dan diberi pelatihan

Pemerintah Kota Semarang juga melakukan Sosialisasi kepada semua elemen. Sosialisasi tersebut berkaitan tentang isi *website*, konten-konten yang ada di dalam *website* dan kegunaan *website*. Selain sosialisasi melalui media surat, pemerintah Kota Semarang juga telah melakukan sosialisasi melalui media sosial seperti *youtube*

3. Sumber Daya Finansial

Sumber pendanaan untuk pelaksanaan *e-government* di Kota Semarang sepenuhnya berasal dari APBD Kota Semarang. Anggaran dalam pelaksanaan dan pengelolaan *e-government* di Kota Semarang yang paling besar digunakan untuk menyewa *bandwidth*. Anggaran untuk sewa *bandwidth* sebesar 4 Milyar.

4. Sumber Daya Infrastruktur

Penyediaan infrastruktur untuk pelaksanaan *e-government* di Kota Semarang yang paling utama adalah komputer. Komputer menjadi peranan penting karena dalam penyelenggaraan *e-government* dilakukan secara elektronik dan hal itu dapat dilakukan ketika ada piranti kerjanya, yaitu komputer. Infrastruktur jaringan didalam pelaksanaan *e-government* di Kota Semarang sudah sampai ditingkat kelurahan. Intranet dan *fiber optic* sudah sampai ditingkat kelurahan

5. Pengguna

a. Manfaat

Manfaat yang diberikan *e-government* untuk pemerintah Kota Semarang adalah mempermudah pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Manfaat yang dirasakan perusahaan dengan menggunakan *website* Kota Semarang adalah perusahaan dapat mengikuti lelang secara elektronik, yang membuat lebih praktis. Manfaat yang dirasakan masyarakat, masyarakat dapat mengetahui segala informasi di Kota Semarang, bermanfaat bagi mahasiswa untuk mencari produk hukum yang diperlukan demi melengkapi tugas-tugas yang diberikan. Inspirasi pengembang *website* juga menjadi manfaat dalam menggunakan *website* Kota Semarang

b. Kesadaran Masyarakat

Sudah banyak mahasiswa dan masyarakat yang sadar akan *e-government* yang memudahkan akses pemerintah ke masyarakat. Namun, terdapat pula masyarakat yang belum mengetahui apa itu *e-government* dan nama situs pemerintah Kota Semarang. Masyarakat lebih memilih untuk melihat media sosial seperti *instagram*, *facebook* dan lain sebagainya dari pada membuka *website* Kota Semarang

- c. Resistensi Terhadap Perubahan Pelaksanaan *e-government* di Kota Semarang menurut Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kota Semarang selama ini tidak mendapatkan penolakan dari masyarakat. Masyarakat merasa antusias dan berebut untuk mengikuti sosialisasi *e-government* yang dilakukan pemerintah Kota Semarang. Masyarakat menerima hadirnya *e-government* karena melihat manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dengan menggunakan *e-government*.

## **B. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan *E-government* di Kota Semarang**

### **1. Faktor Pendorong Pelaksanaan *E-government* di Kota Semarang**

#### **a. Dukungan Pemerintah**

##### **1. Kelembagaan**

Pelaksanaan *e-government* di suatu daerah akan berhasil

apabila memiliki lembaga yang bertugas untuk membuat perencanaan, pelaksanaan serta mengevaluasi. Dilihat dari segi kelembagaan, pelaksanaan *e-government* di Kota Semarang sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan sudah adanya lembaga khusus yang bertugas untuk mengelola *e-government*

##### **2. Perencanaan**

Pelaksanaan *e-government* di Kota Semarang telah memiliki perencanaan *e-government* yang baik. Hal ini dibuktikan dengan sudah adanya *masterplan e-government* di Kota Semarang. Selain itu, Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kota Semarang sebagai dinas yang bertugas mengelola *e-government* juga telah menyusun draft rencana kegiatan dan program tahun 2018 untuk pelaksanaan *e-government* di Kota Semarang

#### **b. Sumber Daya Manusia**

##### **1. Pelatihan**

Pelatihan yang dilakukan pemerintah Kota Semarang mendorong pelaksanaan *e-government*, hal ini dibuktikan dengan telah dilakukannya pelatihan kepada semua lapisan mulai dari pemerintah maupun masyarakat. Pelatihan telah dilakukan sampai tingkat kelurahan. Selain pelatihan, pemerintah Kota Semarang juga telah melakukan sosialisasi untuk lebih mengenalkan *website* Kota Semarang kepada masyarakat salah satunya melalui *youtube*

**c. Sumber Daya Finansial**

Sumber daya finansial mendorong pelaksanaan *e-government* di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang telah memiliki programmer dan analis sendiri sehingga dapat menghemat anggaran yang berasal dari APBD. Selain itu, anggaran pelaksanaan *e-government* di Kota Semarang dapat cair dengan lancar setiap tahunnya.

**d. Pengguna**

1. Manfaat

Manfaat menjadi faktor pendorong pelaksanaan *e-government* karena hadirnya *website* Kota Semarang memberikan informasi yang dapat diperoleh masyarakat tanpa harus bertatap muka dengan pihak pemerintah. Hadirnya *website* membuat masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai kegiatan atau *event* di Kota Semarang. *E-government* juga memberikan manfaat bagi perusahaan yang mengikuti lelang *online*. Sudah terintegrasinya LPSE dengan [semarangkota.go.id](http://semarangkota.go.id) memudahkan perusahaan untuk mengikuti lelang secara online hanya dengan membuka *website* Kota Semarang.

2. Resistensi Terhadap Perubahan  
Resistensi terhadap perubahan menjadi faktor pendorong pelaksanaan *e-government* di Kota

Semarang karena belum ditemuinya penolakan dari warga terkait hadirnya *website* Kota Semarang. Masyarakat Kota Semarang cenderung antusias dalam mengikuti pelatihan dan sosialisasi yang diberikan pemerintah Kota Semarang

**2. Faktor Penghambat**

**Pelaksanaan *E-government* di Kota Semarang**

**a. Dukungan Pemerintah**

1. Kebijakan

Pemerintah Kota Semarang belum memiliki payung hukum khusus seperti peraturan walikota untuk pelaksanaan dan pengeolaan *e-government*

**b. Sumber Daya Manusia**

1. Kemampuan Penggunaan

Komputer  
Pegawai SKPD yang ditugaskan mempunyai ketekunan yang kurang sehingga *update* data informasi masing-masing SKPD terlupakan. Hal ini bisa dikarenakan pegawai yang ditugaskan mengelola isi *website* juga mengemban tugas lain yang diberikan atasan atau karena tingkat pendidikan pengelola yang kurang sesuai.

**c. Sumber Daya Infrastruktur**

Penempatan infrastruktur jaringan di jalan-jalan Kota Semarang atau ditempat-tempat tertentu menghambat pemasangan.

**d. Pengguna**

1. Kesadaran Masyarakat

Masih jarang masyarakat Kota Semarang mengakses *website* Kota Semarang. Masyarakat lebih memilih media sosial yang dimiliki pemerintah kota seperti *instagram* untuk memperoleh informasi sekitar Kota Semarang dari pada harus mengakses *website* Kota Semarang.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

#### **1. Determinan pelaksanaan *E-government* di Kota Semarang**

##### **a. Dukungan Pemerintah**

###### **1. Kebijakan**

Kebijakan yang dianut yaitu Inpres No 3 tahun 2003, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2015 dan surat edaran sekda yang menyatakan semua situs harus beralamatkan [semarangkota.go.id](http://semarangkota.go.id).

###### **2. Kelembagaan**

Lembaga yang mengelola *e-government* adalah Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kota Semarang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2016.

###### **3. Perencanaan**

Perencanaan Pengelolaan *e-government* dibuat dan dijalankan oleh Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kota Semarang

##### **b. Sumber Daya Manusia**

###### **1. Kemampuan Penggunaan Komputer**

Pegawai Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kota Semarang memiliki latar belakang pendidikan sarjana komputer dan mampu menggunakan komputer. Namun, kemampuan penggunaan komputer pegawai SKPD masih kurang karena tingkat pendidikan yang tidak sesuai dan beban kerja yang besar.

###### **2. Pelatihan**

Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, Pemerintah Kota Semarang telah melakukan pelatihan kepada pegawai dan SKPD sesuai kompetensi dan melakukan sosialisasi sampai ke tingkat kelurahan.

###### **c. Sumber Daya Finansial**

Sumber pendanaan pengelolaan *e-government* di Kota Semarang berasal dari APBD Kota Semarang. Dana yang paling besar digunakan untuk sewa *bandwidth* sebesar 4 Milyar

###### **d. Sumber Daya Infrastruktur**

Infrastruktur terpenting dalam pengelolaan *e-government* di Kota Semarang adalah Komputer. Infrastruktur jaringan pelaksanaan *e-government* di Kota Semarang sudah sampai ditingkat kelurahan

###### **e. Pengguna**

###### **1. Manfaat**

Masyarakat mendapatkan informasi produk hukum dan *event* yang diadakan di Kota Semarang. Perusahaan mendapatkan kemudahan

- dalam mengikuti lelang dengan adanya *e-government* di Kota Semarang.
2. Kesadaran Masyarakat masih ada masyarakat yang belum membuka *website* Kota Semarang.
  3. Resistensi Terhadap Perubahan Belum dijumpai penolakan dari warga atau pegawai terhadap adanya *e-government* di Kota Semarang.
- 2. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan *E-government* di Kota Semarang**
- a. Faktor Pendorong Pelaksanaan *E-government* di Kota Semarang**
1. Dukungan Pemerintah
    - a. Kelembagaan Tersedia lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengelola *e-governmnet*
    - b. Perencanaan Perencanaan Kota Semarang telah memiliki *masterplan* dan draff rencana kegiatan dan program *e-government* tahun 2018
  2. Sumber Daya Manusia
    - a. Pelatihan Pemerintah Kota telah melakukan pelatihan dan sosialisasi tentang *e-government* ke SKPD dan masyarakat
  3. Sumber Daya Finansial Anggaran *e-government* dapat cair secara lancar dan dapat menghemat anggaran untuk analis dan programmer.
4. Pengguna
- a. Manfaat Hadirnya *website* Kota Semarang memberikan manfaat untuk masyarakat maupun perusahaan..
  - b. Resistensi Terhadap Perubahan Kota Semarang tidak menemukan penolakan dari pengguna atas kehadiran *website*.
- b. Faktor Penghambat Pelaksanaan *E-government* di Kota Semarang**
1. Dukungan Pemerintah
    - a. Kebijakan Pemerintah Kota Semarang belum memiliki payung hukum khusus seperti peraturan walikota untuk pelaksanaan *e-government*.
  2. Sumber Daya Manusia
    - a. Kemampuan Penggunaan Komputer Pegawai SKPD yang ditugaskan mempunyai ketekunan yang kurang sehingga *update* data informasi masing-masing SKPD terlupakan.
  3. Sumber Daya Infrastruktur Penempatan infrastruktur jaringan di jalan-jalan Kota Semarang atau ditempat-tempat tertentu menghambat pemasangan dan perbaikan.
  4. Pengguna
    - a. Kesadaran Masyarakat Masih terdapat masyarakat yang belum mengenal *e-government* dan membuka *website*. Masyarakat lebih memilih mengakses informasi

melalui media sosial Kota Semarang.

## **B. SARAN**

### **1. Determinan Pelaksanaan *E-government* di Kota Semarang**

Pemerintah Kota Semarang dapat melakukan evaluasi setiap tahunnya untuk melihat perkembangan setiap faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan *e-government* di Kota Semarang, sehingga dapat diketahui faktor mana yang dapat ditingkatkan dan mana yang harus dipertahankan.

### **2. Faktor Pendorong dan penghambat Pelaksanaan *E-government***

a. Untuk mempertahankan faktor pendorong adalah dengan pemerintah dapat berkerjasama dengan pihak lain seperti universitas maupun perusahaan yang ahli dibidang perkomputeran dan programmer untuk membantu memberikan pelatihan dan mengembangkan *e-government* di Kota Semarang. Selain itu, pemerintah Kota Semarang juga dapat melakukan studi banding di daerah-daerah lain untuk mendapatkan inspirasi pengelolaan *e-government* di Kota Semarang.

b. Saran untuk mengatasi faktor penghambat pelaksanaan *e-government* di Kota Semarang adalah :

1. Pemerintah Kota Semarang perlu menyusun regulasi khusus tentang *e-government* di Kota Semarang.

2. Sumber Daya Manusia dari segi pegawai SKPD dalam pelaksanaan *e-government*. Sebaiknya, SKPD terkait mempekerjakan pegawai yang ahli teknologi informasi untuk mengelola informasi yang ada di *website* Kota Semarang. Sehingga pegawai tersebut dapat fokus mengelola *website*.

3. Untuk mengurangi hambatan infrastruktur jaringan, sebaiknya pemerintah bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, pemasangan FO juga dapat dilakukan pada malam hari ketika jalan sepi untuk mengurangi gangguan dari pemakai jalan dan keramaian kota.

4. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan *e-government* dapat dilakukan sosialisasi pentingnya *e-government* ke sekolah-sekolah. Anak-anak diberikan pendidikan mengenai *e-government* dan manfaat membuka *website* Kota Semarang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Perbandingan Administrasi Publik*. Gava Media :Yogyakarta

Indrajid, Richardus Eko. (2004) . *Elektronik Government Strategi Pembangunan dan*

*Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital.* Andi : Yogyakarta

Kumorotomo, Wahyudi. (2009). *Sistem Informasi Manajemen.* Gadjah Mada University Press : Yogyakarta

**Sumber lain :**

AL-Naimat, Ali M..(2013). The Critical Success Factors For E-Government Implementation In Jordan. *Proceedings of the 4th International Conference on Computing and Informatics, ICOCI 2013 28-30 August, 2013 Sarawak, Malaysia.* Paper No 120

Gichoya, David. (2005). Factors Affecting the Successful Implementation of ICT Projects in Government. *Electronic Journal of e-Government* 3(4):175-184. Dalam <http://www.ejeg.com/issue/download.html?idArticle=70> . diakses 11 November 2015.

Gil-García, J. Ramón dan Theresa A. Pardo. (2005). E-government success factors: Mapping practical tools to theoretical foundations. *Government Information Quarterly* 22 (2005) 187–216.

Nabafu, Robinah and Gilbert Maiga. (2012). A Model of Success Factors for Implementing Local E-government in Uganda. *Electronic Journal of e-Government Volume 10 Issue 1 2012, (pp31 - 46)*

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang tahun 2010-2015.

RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) Kota Semarang 2014

<http://www.semarangkota.go.id/>

<http://pegi.layanan.go.id/tabel-hasil-peg-4/>